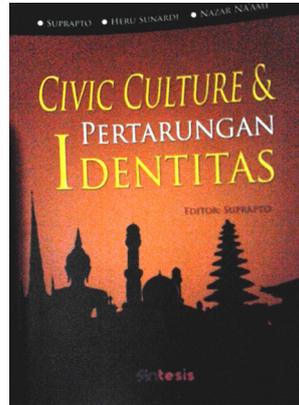


## Beradu Simbol, Berpadu Simpul

**Akmal Salim Ruhana**

Peneliti pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
*akmalsalimruhana@gmail.com*



Judul buku	: <b><i>Civic Culture dan Pertarungan Identitas</i></b>
Penulis	: Suprpto, Heru Sunardi, dan Nazar Na'ami
Penerbit	: Sintesis, Ciputat-Tangerang Selatan
Tahun terbit	: 2013
Ketebalan	: x + 165 halaman

“Di Bali, Anda tidak bisa melihat Lombok, tapi di Lombok Anda bisa melihat keduanya”. Demikianlah bunyi slogan yang tidak sekadar menjadi bahasa penarik wisatawan, melainkan memang gambaran seadanya. Di Kota Mataram, Lombok, Anda bisa menyaksikan jejeran bangunan Pura dan perkampungan Bali, sehingga seakan-akan benar-benar sedang berada di Bali. Demikian juga, ditemukan bertebaran masjid-masjid nan megah, menyadarkan bahwa kita memang sedang berada di Lombok, negeri seribu masjid.

Gambaran kondisi di atas dapat dipandang sebagai nuansa harmoni agama-agama dan etnis-etnis, persisnya Islam-Sasak dan Hindu-Bali. Namun pada saat yang sama dapat pula dipandang sebagai kondisi konfliktual, adanya aura

kontestatif diantara pemilik simbol-simbol keagamaan tersebut. Lebih-lebih, beberapa ruang publik seperti sekolah, perkantoran, pasar, dan taman, ternyata diwarnai pula simbol-simbol itu, dan terkesan saling mendominasi. Ditemukan, misalnya, ada ornamen Bali di gapura sekolah. Ada pula ornamen-kaligrafi Arab di beberapa sudut gedung perkantoran. Benarkah ada kontestasi simbol yang saling mendominasi? Mungkinkah ada *pseudo* konflik di bawah permukaan?

Persis pada problem faktual itulah penelitian yang kini telah berwujud buku karya Suprpto dan kawan-kawan ini hadir. Buku setebal 175 halaman ini memberikan gambaran empirik bagaimana hubungan masyarakat Islam dan Hindu di Kota Mataram

yang multi-etnik dan multi-religius itu. Buku yang ditulis berdasarkan serangkaian penelitian kuantitatif dan kualitatif ini hendak menjelaskan kondisi sesungguhnya dari kesan adanya pertarungan identitas, dan ihwal budaya kewargaan masyarakat. Cukup menjanjikan sebagai penggambaran awal yang membekali kajian-pendalaman selanjutnya.

Dari sisi substansi, buku ini dibagi atas enam bagian. Setelah bagian prolog yang mengantarkan dan melatarbelakangi persoalan, ada pembekalan teoritik soal *civic culture* (budaya kewargaan), pluralitas, dan demokrasi. Setelah itu dikenalkan secara lebih luas mengenai kondisi wilayah penelitian, yang agak terperinci dengan unsur-unsur: historis, demografis, sosial, ekonomi, budaya, kondisi keberagamaan, pendidikan, kesehatan, dan politik. Lalu, ada temuan lapangan yang diwakili subbab "Benarkah Hindu Lebih Toleran?" yang tentu mengundang kepenasaranan pembaca. Pembahasan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif kemudian diterakan dengan elaborasi mengenai kontestasi simbol dan konsolidasi demokrasi. Paparan dipungkasi epilog yang menyimpulkan dan memberikan beberapa penekanan yang menarik untuk dicermati.

Kajian yang mengukur budaya kewargaan dua kelompok umat, Islam dan Hindu, ini menggunakan gabungan pendekatan: kualitatif dan kuantitatif. Dengan wawancara, observasi dan FGD, data kualitatif dapat dijaring dan dilihat kesesuaian atau konsistensinya dengan data hasil jaring kuantitatif. Data kuantitatif dijaring dengan kuesioner. Kuesioner dikembangkan dengan meminjam, mengadopsi, mengadaptasi cara dan indikator budaya kewargaan sebagaimana digunakan Saiful Mujani. Ada tujuh variabel dengan sejumlah indikator. Ketujuh variabel itu, yang

menjadi variabel dependen, adalah: *civic engagement*, solidaritas, *interpersonal trust*, toleransi, ekualitas, *social networking*, dan tradisi berasosiasi. Adapun yang menjadi variabel terikatnya ada dua: teks dan konteks. Teks dimaksud adalah pemahaman keagamaan yang menjadi dasar bagi keyakinan, pengalaman ritual, dan kehidupan sosial responden. Sedangkan konteks adalah kondisi atau keadaan demografi, sosial, politik, dan ekonomi responden.

Apa temuan penelitian ini? Menarik mencermati angka-angka yang menunjukkan *empirical explanation* dari fakta sosial yang boleh jadi multiperspektif. Soal *civic engagement*, ternyata partisipasi umat beragama dalam kegiatan kebangsaan dan sosial cukup baik. Sebanyak 78% responden muslim menyatakan sering terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat, dan 65% kalangan Hindu juga demikian. Lalu, sebanyak 80% warga ikut memasang bendera merah putih saat perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Meski demikian, hanya 30% saja responden yang terlibat dalam prosesi upacara benderanya.

Terkait solidaritas, cukup menarik, ditemukan bahwa secara umum tingkat solidaritas warga Hindu lebih tinggi dari muslim. Sebanyak 80% kalangan Hindu yang sering mengundang warga yang berbeda agama, sedangkan muslim hanya 41%. Demikian juga sebanyak 88% umat Hindu sering menghadiri undangan dari tetangga yang berbeda agama, adapun muslim hanya 41%. Lalu, ada 80% kalangan Hindu yang menyatakan sering ikut melayat tetangga yang berbeda agama, dibandingkan dengan muslim yang hanya 39%. Dari gambaran ini, adakah benar umat Hindu lebih toleran?

Terkait *interpersonal trust*, warga Hindu rasa saling percayanya lebih tinggi dari muslim. Hindu 90% dan muslim 76%. Kesiediaan memilih orang lain menjadi pemimpin sebanyak 90% bagi kalangan

Hindu dan hanya 21% di kalangan muslim. Terkait toleransi, sebanyak 45% pemeluk agama Hindu memperbolehkan putra/putri mereka mempelajari agama lain. Sementara di kalangan muslim hanya 11%. Sekali lagi, benarkah umat Hindu lebih toleran? Mengapa?

Penulis buku menjawab pertanyaan di atas dengan mengajukan dua hal. *Pertama*, mungkin karena pemeluk Hindu menjadi minoritas secara demografis di Lombok maka ditengarai lebih banyak menyesuaikan, mengalah, atau tidak terlalu dominatif. Dan *kedua*, dikarenakan Hindu bukan agama misi (*un-missionary religion*). Karena itu, dalam posisi tersebut dapat dipahami jika terkesan lebih toleran, mengalah.

Dibagianakhir, buku ini menjelaskan simpulan atas riset-kelompok ini. Diantara simpulannya adalah jawaban atas pertanyaan di paragraf kedua di atas. Bahwa simbol-simbol keagamaan yang tersebar dan beragam itu ada ternyata tidak (atau belum) mengganggu budaya kewargaan antara Hindu dan Islam di Lombok. Setiap kelompok sejauh ini menerima kehadiran simbol-simbol itu. Kesan kontestasi tidak terkonfirmasi dan tidak masalah, melainkan kesemarakkan simbol itu justru menjadi *point* tersendiri bagi pengembangan pariwisata Lombok. Lalu, meski saat ini relatif aman, namun ada beberapa catatan sejarah konflik Islam-Hindu di Lombok yang membuat parapihak harus senantiasa waspada akan potensi konflik yang mungkin tiba-tiba muncul.

Kajian Suprpto dan kawan-kawan ini patut dibaca dan dipersandingkan dengan temuan-temuan lain, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Kondisi empirik Lombok yang digambarkannya, hemat penulis, terasa berlebihan dan terkesan menenggelamkan realitas yang dalam tingkat tertentu hal ini kurang menguntungkan bagi hakikat kerukunan umat beragama. Sebagaimana diketahui,

sejarah mencatat ada sejumlah kasus keagamaan di NTB yang menjadi nila atas “gambar cerah” data hasil kuesioner tersebut. Dari sejumlah sumber, berikut diantara konflik yang telah pernah memanifestasi di Lombok. Pada 1980, misalnya, terjadi *mesiat* (perang) antara warga Karang Taliwang dengan Sindu dan Tohpati. Kemudian, sejumlah gesekan, atau konflik juga terjadi pada 2000 antara warga Tohpati dan warga sekitarnya; tahun 2001 antara warga Nyangget dengan Saksari; tahun 2003-2005 di masyarakat Petemon dan Karang Genteng; pada 2006 warga Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat; pada 2008 antara warga Lingkungan Sindu dan Warga Lingkungan Nyaget. Tahun 2011 workshop warga Karang Bagu dan Karang Taliwang; tanggal 8 Desember 2012 antara warga Tohpati dan Karang Mas-Mas. Lalu, tanggal 9 Maret 2013 antara warga Tohpati dan Karang Mas-Mas; Juni 2010 antara warga Tohpati dan Pandan Salas; dan pada Mei 2013 warga Pejajaran dan penganut aliran Salafi/Wahabi. Meski kasus-kasus di atas tidak selalu disebabkan hal agama, namun simbol dan pelaku kerap kali bersinggungan dan/atau dalam perkembangannya kasus tersebut melibatkan unsur agama. Terjadinya kasus-kasus tersebut di atas secara nyata menunjukkan adanya ancaman potensi konflik yang senantiasa menghantui kondisi kasat mata yang aman saat ini.

Meski demikian, menarik juga menghubungkan temuan penelitian ini dengan hasil survei nasional kerukunan umat beragama di Indonesia 2012 oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Seakan mengonfirmasi kajian ini, survei itu menemukan bahwa NTB memperoleh indeks kerukunan 3,8 yang berarti cukup harmonis. Survei nasional yang melakukan pengumpulan data di ibukota provinsi tersebut menyatakan kondisi kerukunan dan hubungan antarumat beragama di Kota Mataram cukup kondusif.

Dari kaca mata peneliti, buku/ penelitian ini sudah cukup bagus, bahkan seperti tidak memberi ruang koreksi sedikitpun. Baik pemosisian permasalahan, penggunaan metodologi, hingga operasionalisasi konsepnya, telah dilakukan secara baik. Artikulasi dan penulisan hasilnya pun terasa mengalir dan mudah dicerna pembaca. Memang ada beberapa salah ketik (*typo*) ataupun kata asing yang belum dimiringkan penulisannya, namun hal itu masih bisa dimaafkan—terutama karena secara substansial penelitian ini cukup bernas. Konsep-konsep yang digunakan telah memiliki dasar pijak referensi yang memadai, demikian pula peminjaman teori-teori dalam membaca realitas temuan juga dirasa tepat. Bahkan karena menggunakan (meminjam) beberapa standar pengukuran yang sudah teruji, seperti pengukuran kadar budaya kewargaan ala Saiful Mujani, maka hasilnya pun relatif *standardized* secara akademis. Eksplorasi permasalahan dan data juga terlihat dalam, dimana mengindikasikan bahwa peneliti hadir secara lama dan bahkan tinggal di lokasi penelitian.

Memang mungkin akan lebih baik jika penggunaan istilah asing "*civic*

*culture*" yang dipakai dalam penelitian ini diganti dengan bahasa Indonesia "budaya kewargaan" saja. Selain lebih membantu pembaca-pemula, juga konsepnya terasa lebih *homegrown* dalam konteks keindonesiaan. Mungkin juga, secara teknis, akan lebih baik jika grafik dan tabel penyajiannya dibuat lebih baik agar mudah dibaca dan dipahami. Hal ini juga mungkin terkait dengan penggunaan kertas *bookpaper* yang tidak lebih jelas menunjukkan hasil dibanding jika menggunakan jenis HVS. Termasuk dalam usulan ini, baik sekali jika

Di atas segalanya, buku ini telah berhasil memberikan wawasan kepada pembaca tentang kondisi empirik kehidupan beragama di Lombok NTB tahun 2012, sekaligus menjawab permasalahan penelitiannya. Bahwa kesemarakkan simbol-simbol di ruang publik ternyata belum mengganggu budaya kewargaan kedua komunitas, Islam dan Hindu. Meski simbol tampak beradu, namun simpul-simpul tetap terpadu. *Dus*, selain layak dibaca, buku hasil penelitian ini layak untuk dikutip dan/atau dikembangkan dalam penelitian-kajian lanjutan yang lebih spesifik dan mendalam. []